UNIT PELAKSANA PERPUSTAKAAN * UNIKOM *

BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero)

Berdirinya PT. Perkebunan di Jawa Barat dimulai dari pengambil alihan perusahan-perusahan milik Belanda di Indonesia sehubungan dengan perjuangan mengembalikan Irian barat ke pangkuan Republik Indonesia. Dilandasi dengan S.K Penguasa Militer/Men Hankam tanggal 9 Desember 1957, Nomor 1063 / PM.T/ 1957 dan S.K Menteri Pertanian Nomor 229/UM/57, tanggal 10 Desember 1957, pemerintah R.I dengan tegas dan berani melaksanakan tindakan ambil alih perusahaan-perusahaan Perkebunan Belanda.

Adapun kronologis riwayat singkat perusahaan perkebunan Ex milik Belanda.

Periode Tahun 1950-1957

Perkebunan-perkebunan di Jawa Barat milik Belanda dan asing lainnya Berangsur-angsur direhabilitir sebagai akibat kerusakan-kerusakan pada masa pendudukan Jepang. Perusahan perkebunan tersebut diatur dan dikelola dengan sistim "Directie Administrasi", Setiap Direksi Administrasi mengelola beberapa Perkebunan, yaitu;

1. II.II. My Tiedeman & Van Kerchem 21 Perkebunan
2. Fa waering & Loeber 17 Perkebunan
3. N.V. Parakan salak 4 Perkebunan
4. Cultuur Bank 2 Perkebunan

5.	N.V. Kooy & Coster van Voorhout	5 Perkebunan
6.	Fa.II.C.Th Crone	6 Perkebunan
7.	Geo Wehry & Co. Fa	4 Perkebunan
8.	Reyn & Viny Anemaat & Co	3 Perkebunan
9.	N.V. John Peet & Co	6 Perkebunan
10.	C.P. Waller & Plate	2 Perkebunan
11.	J. M.W. Van Dusseldrop & Co	6 Perkebunan
12.	Nationale Industrie & Landbouw My	3 Perkebunan
13.	Factory N.V	6 Perkebunan
14.	N.V. Internatio	1 Perkebunan
15.	P & T Lands Ltd	20 Perkebunan
16.	J.A.Wattie Ltd	9 Perkebunan
17.	Harissons & crossfield	2 Perkebunan

Periode Tahun 1957-1960

Pada Periode ini perusahan Perkebunan Milik Belanda diambil alih sesuai dengan ketepan penguasa pada masa itu, sebagai pelaksanannya di Jawa Barat dikeluarkan Penetapan Militer dimana menetapkan Pengelompokkan Perusahaan perkebunan kedalam beberapa kelompok.

PeriodeTahun 1963-1968

Dalam tahun 1963 diadakan lagi reorganisai dengan tujuan agar pengelolaan perusahan perkebunan lebih tepat guna dengan pembentukan BPU per budidaya (komoditi) yaitu BPU karet, BPU Aneka Tanaman, BPU Gula, BPU Tembakau.

Periode Tahun 1968-1971

Dalam rangka meningkatkan efektiviatas dan efisiensi perusahan Perkebunan Negara, maka berdasarkan PP No. 13 tahun 1968, sebnayak 88 buah PPN, di Indonesia diciutkan menjadi 28 buah saja dalam bentuk Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Di tingkat pusat dibentuk Badan khusus Urusan PNP (BKU-PNP) sebagai pengganti BPU/per komoditi yang merupakan suatu badan yang membantu Menteri Pertanian dalam melaksanan tugas pengawasan dan bimbingan kepada PNP.

Periode Tahun 1971

Berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1969 secara berangsur-angsur dilakukan pengalihan bentuk PNP menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (Persero) disingkat PTP. Ditingkat pusat dengan SK. Menteri No. 128/Kpts/Org/3/76 tanggal 8 Maret 1967 BKU-PNP dengan Keempat Perwakilannya didaerah dibubarkan dan dengan SK Mentan Tahun 1976 dibentuklah lembaga baru, yaitu Staf Bantuan Menteri Pertanian, yang kemudian berubah menjadi Staf Bina Perusahaan negara Sektor Pertanian.

Sebagai lembaga Pengawasan di lapangan (daerah) dengan SK. Mentan tahun 1977 perwakilan BPU-PN Perkebunan wilayah dirubah namanya menjadi Inspeksi PNP/PTP Wilayah, yang ruang lingkup tugasnya masing-masing meliputi daerah perwakilan BKU-PNP Wilayah I s/d IV, yang kemudian berubah lagi menjadi koordinator PT. Perkebunan WilayahI s/d IV.

Sejak tahun 1971, PNP di Jawa Barat dan Sumatera selatan berubah bentuk hukumnya menjadi PT. Perkebunan (Persero), yaitu : PT. Perkebunan X

tahun 1980, PT. Perkebunan XI,XII dan XIII pada tahun 1971 dan PT. Perkebunan XIV pada tahun 1981.

Periode Tahun 1994 s/d Sekarang

Untuk memantapkan peran BUMN sektor pertanian dalam pengembangan dan perekonomian Nasional, serta dalam rangka menyongsong era globalisasi ekonomi dunia, Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah mengambil langkah-langkah konsolidasi BUMN sektor Pertanian

Pelaksanaan Konsolidasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

a. Tahap pertama, berjalan sejak bulan Mei s/d 11 Maret 1996 pada rahap ini PTP-PTP dikelompokkan berdasarkan wilayah dimana PTP yang bersangkutan berada. Dari PTP yang sebanyak 26 buah dikelompokkan menjadi 9 buah. Semula jumlah PTP yang dikelompokkan akan ditambah dengan 2 (dua) buah lagi, yaitu Wilayah Propinsi Riau dan Jambi serta Wilayah Propinsi Kalimantan.
b. Tahap kedua, berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6s/d 19 tahun 1996,tanggal 14 Februari 1996, sebagai kelanjutan dari konsolidasi PT, dilakukan peleburan BUMN Sub Sektor Perkebuanan dan Peternakan yang semula berjumlah 26 PTP menjadi 14 Perkebunan Nusantara (PTPN), yaitu PTPN I s/d XIV.

PT. Perkebunan Jawa Barat yang semula terdiri dari PTP XI, PTP XII dan PTP XIII melalui PP No. 13 Tahun 1996 dilebur menjadi PT. Perkebunan Nusantara VIII.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Tempat dan kedudukan perusahaan, dimana penulis melaksanakan kerja praktek yaitu di PT.Perkebunan Nusantara VIII jalan Sindangsirna No. 4 Bandung.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Bentuk dan badan hukum Perusahaan yaitu sebagai berikut

PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) didirikan berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil , SH No. 41 Tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan SK Nomor C2-8336.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 1996 tentang peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XI. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIII menjadi PT. Perkebunan Nusantara VIII.

2.4 Aktifitas-aktifitas PT. Perkebunan Nusantara VIII

PTPN VIII bergerak dibidang Agrobisnis yang berorientasi kepada laba, dan selalu berusaha menjadi perusahaan yang sehat , oleh karena itu PTPN VIII sangat menaruh perhatian terhadap upaya-upaya efisiensi operasional. Kegiatan usaha meliputi pembudidayan tanaman, pengolahan/produksi, dan penjualan komoditi perkebunan teh, kina, karet, kakao, sawit dan gutta percha, serta berupaya pula mengembangkan Agrowisata.

Pemasaran hasil produksi ditujukan untuk pasar ekspor dan lokal. Penjualan ekspor pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang, yang

diselenggarakan sendiri oleh PTPN VIII. Selain itu, sebagai BUMN PTPN VIII juga mengemban nilai sebagai agen pembangunan dan pengabdian masyarakat.

Tujuan dan maksud perusahaan yaitu turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan Program Pemerintah dibidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya. Khususnya di sub Sektor Pertanian dalam arti seluas-luasnya dengan tujuan memupuk keuntungan bedasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Tugas pokok PTPN VIII adalah:

1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan perusahaan budidaya tanaman tersebut.
2. Produksi meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi.
3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan barang lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan.
4. Pengembangan usaha bidang perkebunan, Agrowisata dan Agrobisnis.

Perseroan dapat pula mendirikan/menjalankan perusahaan dan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan usaha bidang pertanian, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan lain, sepanjang tidak

bertentanagn dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar

2.5 Bidang Pekerjaan Tempat Praktek kerja

2.5.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia yaitu merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat didalam suatu negara, sehingga menggambarkan jumlah angkatan kerja dari suatu negara/ daerah atau dapat juga dikatakan golongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja organisasi tertentu baik pemerintah maupun swasta.

Sumber daya manusia sangatlah penting dalam satuan unit organisasi, dimana hal itu berkaitan dengan pengerjaan dan pengembangan suatu bidang tertentu untuk menunjang hal tersebut diperlukanlah pendidikan dan latihan secara terstruktur serta rutin sesuai dengan kebutuhan sehingga kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang profesional dibidangnya dapat digunakan dengan baik oleh perusahaan, begitupun yang terdapat dalam PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Kegiatan pendidikan dan latihan adalah kegiatan yang berada pada Divisi Sumber Daya Manusia yang bertugas sebagai berikut:

1. Menyusun/ membuat peraturan dibidang ketenagakerjaan
2. Menyusun program serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan
3. Memproses permohonan ijin keluar negeri, termasuk dokumen-dokumen imigrasi (paspor)
4. Melaksanakan penelitian

5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi karyawan
6. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
7. Memelihara dan mengawasi inventaris surat-surat dan dokumen-dokumen penting

Dalam mempelancar arus informasi dalam proses pendidikan dan latihan tersebut diperlukanlah suatu perantara informasi tersebut berupa surat-surat pemberitahuan atau persetujuan.

2.5.2 Ruang Lingkup Bagian Pendidikan dan Latihan

Ruang Lingkup Bagian pendidikan dan latihan Pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) terdiri dari:

- Perencanaan dan persiapan untuk pendidikan karyawan, yang diikuti oleh peserta dari berbagai tingkatan golongan yang telah dijabatnya
- Menginformasikan waktu pendidikan dan latihan tersebut pada karyawan yang akan mengikutinya dengan surat pemberitahuan dan persetujuan
- Memproses surat-surat yang masuk dan keluar (agenda surat) baik untuk bagian Diklat maupun untuk bagian lainnya dalam satu divisi Sumber Daya Manusia

2.5.3 Tugas dan Tanggung jawab Bagian Pendidikan dan Latihan

Tugas dari pada Pendidikan dan Latihan terdiri atas:

- Merencanakan dan melaksanakan program Pendidikan dan Latihan bagi karyawan berupa pendidikan formal, kursus jabatan, seminar/lokakarya.

- Membina, memotivasi dan menilai karyawan bawahannya untuk meningkatkan prestasi dan disiplin kerja
- Mengurus dan memonitor kegiatan PMT/GKM.
- Menyiapkan data karyawan menurut pendidikannya
- Melayani mahasiswa/pelajar yang akan mengadakan praktek/survei dilingkungan perusahaan
- Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja (RKAP)
- Menyusun /memonitor daftar hadir karyawan kantor Direksi dan menyelenggarakan administrasi lainnya di bagian Sumber Daya Manusia
- Memelihara dan mengawasi inventaris dan surat-surat atau dokumen-dokumen penting dibidang urusannya
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
- Memonitor atau mencatat surat-surat masuk/keluar di bagian Sumber Daya Manusia (Agenda surat)
- Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugasnya kepada kepala bagian Sumber Daya Manusia

2.6 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VIII

PT.Perkebunan Nusantara VIII dikelola dan dipimpin oleh suatu dewan direksi dan diawasi langsung oleh dewan komisaris. Berikut ini susunan pejabatnya:

Susunan Komisaris

- Komisaris Utama : Ir. Cahyana Ahmadjayadi
- Komisaris : Ir. H. Imam Wahyudi
- Komisaris : Ir. Harry Susetyo Nugroho, MBA
- Komisaris : Ir. M. Ta'dung Tandipau
- Komisaris : Ir. Junaedi Tossin

Susunan Direksi

- Direktur Utama : Drs. H. Sobana Suwarna, Ak, SH
- Direktur Produksi : Ir. H. Abdul Halik, MM
- Direktur Keuangan : DR. H. Dudung Suryana, SE, AK, MBA
- Direktur SDM/Umum : Rd. H. Slamet Bangsadikusumah, SH, MBA
- Direktur Pemasaran : Drs. H. Yaman Abdullah, Ak, MBA

Masing-masing direktur membawahi beberapa divisi atau bagian yaitu:

I. Direktur utama

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh keempat direktur dibawahnya, dan dalam hal ini direktur utama membawahi langsung:

1. Divisi Pengembangan Usaha

   Membawahi :

   - Bagian Kajian Usaha
   - Bagian Administrasi Proyek
   - Bagian PUKK

2. Divisi Pengawasan Intern

   Membawahi :

   - Bagian Pengawasan operasional
   - Bagian Pengawasan Keuangan
   - Bagian Analisa dan Evaluasi
   - Bagian Urusan Sistem dan Prosedur

3. Koordinasi dengan Kebun Rumah sakit dan UUPT

II. Direktur Keuangan, Membawahi langsung:

1. Divisi Keuangan

   Membawahi :

   - Bagian Tata Usaha Keuangan
   - Bagian Asuransi dan Pajak

2. Divisi Akuntansi

   Membawahi :

   - Bagian Tata buku induk
   - Bagian Pengelolaan Data, Pelaporan dan Anak Perusahaan
   - Bagian Komputerisasi
   - Bagian Anggaran

III. Direktur SDM dan UMUM, membawahi langsung:

1. Divisi Sekretariat

   Membawahi :

   - Bagian Sekretari

- Bagian Rumah Tangga
- Bagian Humas dan Agrowisata

2. Divisi Umum

Membawahi :

- Bagian Hukum
- Bagian Keamanan
- Bagian Agraria

3. Divisi Sumber Daya Manusia

Membawahi :

- Bagian Personalia
- Bagian Pendidikan dan Latihan
- Bagian Hak dan Kesejahteraan
- Bagian Kesehatan

IV. Direktur Pemasaran, membawahi langsung:

1. Divisi Pemasaran

Membawahi :

- Bagian Administrasi Persediaan
- Bagian Pemasaran K3SG
- Bagian Pemasaran Teh dan Kina

2. Divisi Pengadaan Barang dan Jasa

Membawahi :

- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Produksi
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sarana Penunjang

V. Direktur Produksi

Dalam pelaksanaan tugasnya membawahi langsung ketiga divisi dan empat inspektur Wilayah dimana keempat inspektur wilayah tersebut langsung dikoordinasi direktur utama, yaitu :

1. Divisi Tanaman

   Membawahi :

   - Bagian Pemeliharaan Tanaman Teh dan Kina
   - Bagian Pemeliharaan Tanaman K3SG
   - Bagian Proteksi dan Pemupukan
   - Bagian Panen Tanaman Teh dan Kina
   - Bagian Panen Tanaman K3SG

2. Divisi Teknik

   Membawahi :

   - Bagian Mesin dan Instalasi
   - Bagian Sipil dan Transportasi

3. Divisi Teknologi

   Membawahi :

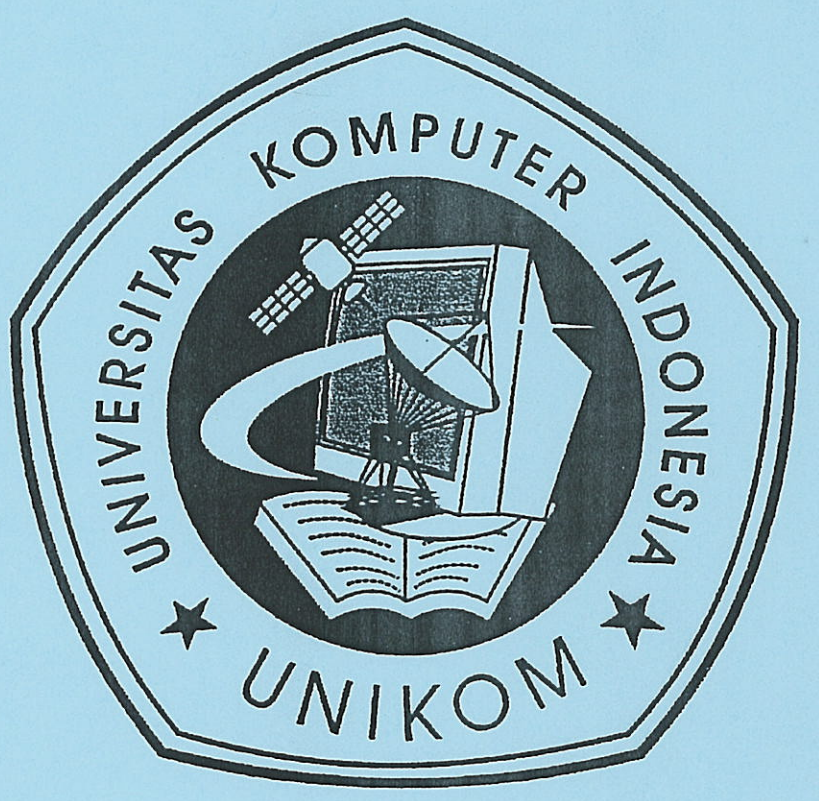
   - Bagian Teknologi Teh dan Kina

- Bagian Teknologi K3SG
- Bagian Pengendalian Mutu

2. Inspekur wilayah I sampai dengan IV

Membawahi :

- Urusan Tanaman
- Urusan Teknik dan Teknologi


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM